

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI**

#### **2.1 Sejarah Perusahaan**

Indonesia merupakan negara dengan potensi kekayaan alam yang sangat beragam, dikarenakan letak negaranya yang tergolong strategis. Dapat dilihat dari sudut astronomis yang berada di antara dua benua Asia dan Australia serta dua Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Maka dari itu sektor pertanian di Indonesia menjadi sektor penting bagi perekonomian bangsa. Tidak hanya itu, Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan berbagai produk dari usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Untuk menaungi dan menangani usaha atau masalah pertanian tersebut perlu dibentuk organisasi. Organisasi yang menangani usaha atau masalah pertanian adalah Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian didirikan pada masa pendudukan Belanda yaitu pada tanggal 1 Januari 1905 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 23 September 1904 No. 20 Staatsblaad 982 dengan didasarkan juga pada Surat Keputusan Raja Belanda No. 28 tanggal 28 Juli 1904 (Staatsblaad No. 380). Direktur Pertama Departemen Pertanian adalah Dr. Melchior Treub. Pada masa penjajahan Belanda urusan pertanian ditangani oleh Departement van Landbouw (1905), Nijverheid en Handel (1911) dan Departement van Economische Zaken (1934). Pada masa ini perkebunan rakyat dan pertanian dan turun drastis karena sebagian lahan dikuasi oleh Belanda. Sedangkan pada masa pendudukan Jepang, urusan pertanian dipegang oleh Gunseikanbu Sangyobu. Nasib petani pada masa ini jauh dari kemakmuran karena pertanian dikuasai penjajah dan petani hanya menjadi buruh pertanian.

Setelah proklamasi Kemerdekaan Indonesia terbentuklah kabinet presidensial. Urusan pertanian, perdagangan, perindustrian diserahkan kepada Kementerian Kemakmuran yaitu Ir. R. Panji Surachman Tjokroadisurjo sebagai Menteri Kemakmuran pertama. Keadaan pada saat itu masih kacau karena kedatangan tentara Belanda. Akibat kekacauan

tersebut Kementerian Kemakmuran mendirikan cabang di Magelang yang dipimpin oleh R. M. Reksohadiprojo. Pada bulan Juli 1947, kantor dipindahkan ke Borobudur dan beralih lagi ke Yogyakarta.

Tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden dalam pembentukan Kabinet Kerja dan menetapkan perubahan nama Departemen Pertanian menjadi Kementerian Pertanian. Kemudian tahun 1962 Pemerintah bertekad untuk mencapai Swasembada beras, namun tidak banyak kemajuan karena adanya berbagai masalah politik yang ada di Indonesia saat itu. Tahun (1986) pada masa ke Presidenan Soeharto, Departemen Pertanian dipimpin oleh Mayor Jenderal Sucipto. Pada masa ini Departemen Pertanian mengalami banyak kemajuan karena Soeharto sangat memahami bahwa kunci pemerintahan di negara yang miskin adalah “kecukupan pangan”.

Di era repelita Departemen Pertanian banyak mengalami kemajuan, salah satunya adalah tercapainya Swasembada beras (1984) yang diinginkan sejak tahun 1962: Keberhasilan ini didukung karena adanya Program Bimas (Bimbingan Masal) yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani.

**a. Repelita I (1968 – 1973)**

Pada era ini pertanian diarahkan pada kebutuhan pangan terutama beras.

**b. Repelita II (1973 – 1978)**

Mengutamakan pembangunan sektor pertanian untuk meningkatkan produksi, memperluas kesempatan kerja, dan menaikkan pendapatan petani.

**c. Repelita III (1978 – 1983)**

Meningkatkan produksi bahan pangan, ekspor, penghasilan petani serta menciptakan dukungan yang kuat bagi pembangunan industri.

**d. Repelita IV (1983 – 1988)**

Meningkatkan kerja keras petani, pemanfaatan teknologi, penyuluhan yang berkesinambungan, dan kebijakan harga pasar beras.

**e. Repelita V (1988 – 1993)**

Memperbaiki taraf hidup dengan meningkatkan produktivitas pertanian. pada era ini ekspor pertanian meningkat karena komoditas pertanian meningkat.

**f. Repelita VI (1993 – 1998)**

Program pertanian rakyat terpadu di tunjukan untuk membantu petani dalam mengembangkan usahanya dengan pendekatan usaha tani terpadu dimana pilihan komoditinya disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia.

Secara perlahan Departemen Pertanian mulai menunjukkan keberhasilannya dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Kemudian pada tahun 2009, Pemerintah mengubah semua Departemen Negara menjadi Kementerian Negara termasuk pada Departemen Pertanian menjadi Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

**a. Kabinet Persatuan (1999 – 2001)**

Pembangunan pertanian bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

**b. Kabinet Gotong Royong (2001 – 2004)**

Sektor pertanian untuk menanggulangi kemiskinan melalui penciptaan kesempatan kerja

**c. Kabinet Indonesia Bersatu (2004 – 2009)**

Sektor pertanian merupakan salah satu dari tujuh prioritas utama pembangunan utama pembangunan ekonomi.

**d. Kabinet Indonesia Bersatu II (2009 – 2014)**

Pembangunan pertanian berusaha mewujudkan sistem pertanian Bio Industri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Pada tanggal 27 Oktober 2014, Menteri Pertanian dijabat oleh Amran Sulaiman dengan sekretarisnya Hari Prayono. Selama masa jabatannya, Amran Sulaiman mampu meningkatkan produksi pangan secara strategis

sehingga bahan baku impor turun bahkan tidak ada impor seperti, cabai, padi, dan bawang merah. Beliau menerapkan kebijakan atau gagasan baru yaitu pembangunan pertanian sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Kebijakan tersebut yaitu penyempurnaan regulasi dan penataan SDM pertanian dan manajemen. Kebijakan tersebut mencakup semua aspek, meliputi aspek revisi Pepres tentang pengendalian impor, ekspor dan kebijakan penataan SDM. Di tahun 2045 ditargetkan menjadi lumbung pangan dunia.

Kemudian pada tahun ini yaitu tahun 2021 Menteri Pertanian dijabat oleh Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H. dengan sekretarisnya Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc. Dalam masa jabatannya Syahrul Yasin Limpo mengatakan hingga 2 Agustus 2021, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian sudah mencapai Rp 43,60 triliun dari total yang dialokasikan sebanyak Rp 70 triliun.

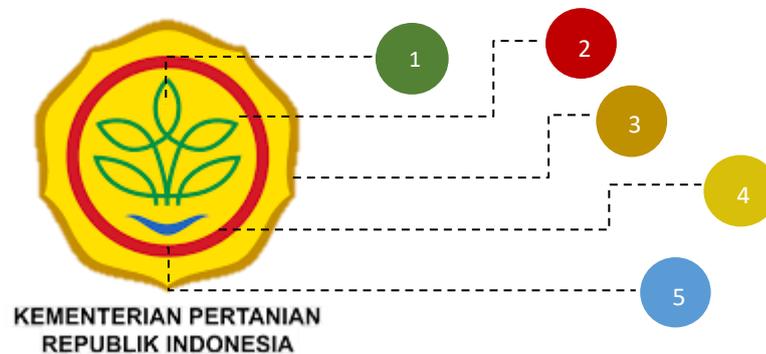


**Gambar II. 2 Dr. Syahrul Yasin Limpo**  
Sumber: Wikipedia



**Gambar II. 1 Gedung Kementerian Pertanian RI**  
Sumber: <https://masgunawan.id/foto>

### 2.1.1 Logo Kementerian Pertanian Republik Indonesia



#### Keterangan:

1. Tunas: Menggambarkan pengertian Biologis dari pada seluruh kegiatan yang dikelola oleh Departemen Pertanian. Kecuali manusia, sebagai benda hidup dan warna hijau muda melambangkan pengertian kehidupan.
2. Lingkaran Bewarna Merah: Melambangkan pengertian kesatuan.
3. Lingkaran Yang Bersudut Lima Buah Bewarna Cokelat: Melambangkan pengertian dari pada unsur pelaksana utama (tugas-tugas pokok Departemen Pertanian).
4. Kuning Emas: Warna dasar baik untuk Panji, maupun Vandel dan sebagai lambang kemegahan.
5. Air Bewarna Biru Muda: Mempunyai pengertian sebagai lambang keagungan.

### 2.1.2 Visi dan Misi Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden RI 2020 – 2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mendukung Visi tersebut, maka Kementerian Pertanian menetapkan Visi dan Misi Pertanian Tahun 2020 – 2024, sebagai berikut:

#### **a. Visi Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

Visi merupakan tujuan utama atau cita-cita jangka panjang yang dimiliki suatu perusahaan atau instansi. Visi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Visi tersebut memiliki makna:

- Majunya sektor pertanian yang ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri dalam hal pangan yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani.
- Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian direalisasikan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian yang didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

#### **b. Misi Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

Misi merupakan cita-cita jangka pendek dan direalisasikan pada masa kini. Di dalam sebuah perusahaan atau instansi, misi menjadi hal yang penting karena menjadi tolak ukur dalam kinerja perusahaan atau instansi. Dalam rangka mewujudkan visi, maka misi Kementerian Pertanian yaitu “Mewujudkan Ketahanan Pangan, meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Misi tersebut memiliki makna:

- Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhi dan tersedianya pangan bagi negara sampai perseorangan. Selain itu, menjadikan pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

- Daya saing pertanian yang dimaksud yaitu dalam sektor pertanian mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggeser produk impor dengan produk lokal dalam hal pertanian.

Dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian Republik Indonesia di atas tersebut, maka terciptalah tujuan pembangunan pertanian untuk periode 2020 – 2024 yang ingin dicapai yaitu:

- Terwujudnya Reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.
- Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan.
- Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian.

### 2.1.3 Prestasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Kementerian Pertanian menerima penghargaan dalam kategori Kementerian atau Lembaga terbaik dalam anggaran tahun 2016 bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kepolisian RI dan Kementerian Sosial. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan diterima oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Hari Priyano pada masa jabatannya.

Untuk bagian arsiparis sendiri mendapat penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai kementerian yang memperoleh kategori baik berdasarkan hasil pengawasan kearsipan pada tahun 2018.



**Gambar Il. 3 Piagam Penghargaan**  
**Sumber: Pribadi**

Selain itu pada tahun 2020, Kementerian Pertanian Republik Indonesia diberikan penghargaan *Top Digital Transformation Readliness 2020* dalam acara *Top Digital Award 2020* yang diselenggarakan majalah *It Works*. Kementerian Pertanian dinilai berhasil mengimplementasikan dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja, daya saing, dan layanan kepada masyarakat.



**Gambar II. 4 Penghargaan Top Global Award 2020**  
**Sumber: [www.pertanian.go.id](http://www.pertanian.go.id)**

Kemudian, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dianugerahi penghargaan sebagai *Top Leader on Digital Implementation 2020*. Selain itu pada tahun 2020 Kementerian Pertanian meraih lebih dari 5 penghargaan. Diantaranya adalah penghargaan KPPU Award tingkat pusat untuk katagery kemitraan tahun 2020, Penghargaan Pengelolaan Barang dan Jasa 2020, Penghargaan sebagai Kementerian Paling Informatif tahun 2020 dari Komisi Informasi Pusat, Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), dan Penganugerahan Menteri Pertanian atas dedikasi dan pengabdian tanpa batas dalam acara Gatra Awards 2020.

Sedangkan penghargaan untuk Sub.Bagian Kearsipan yang dimana menjadi tempat bagian Praktikan dalam Kerja Profesi adalah diraihnya penghargaan untuk kategori AA di tingkat Kementerian Arsip Republik Indonesia (ANRI) pada peringatan Hari Kearsipan ke-50. Berdasarkan nilai dari hasil pengawasan Kearsipan tahun 2020, Kementerian Pertanian mendapatkan skor yang nyaris sempurna yaitu sebesar 97,79. Berikut beberapa penghargaan yang pernah di dapat Sekretariat Jenderal Biro

Umum dan Pengadaan bagian Kearsipan dan Tata Usaha di Sub Bagian Kearsipan:



**Gambar II. 5 Penghargaan Arsiparis Teladan 2015**  
Sumber: Rekan Kerja



**Gambar II. 6 Anri Award 2016**  
Sumber: Rekan Kerja



**Gambar II. 7 Penghargaan Kementerian Perindustrian 2017**  
Sumber: Rekan Kerja



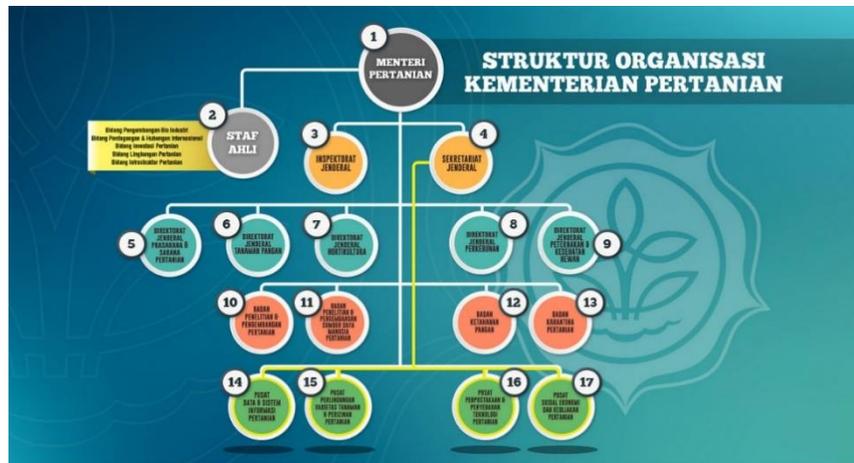
**Gambar II. 8 Anri Award 2017**  
**Sumber: Rekan Kerja**

## 2.2 Struktur Organisasi

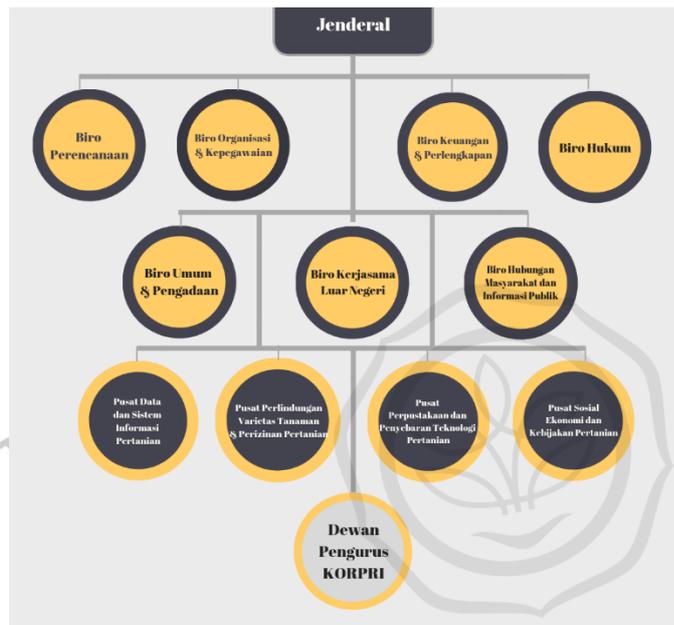
Robbins dan Coulter (2016: 322) mendefinisikan bahwa struktur organisasi adalah pengaturan formal pekerjaan dalam suatu organisasi. Struktur ini dapat ditampilkan secara visual dalam bagan organisasi. Sedangkan menurut (Gill Corkindale, 2011) mengungkapkan bahwa desain dan struktur organisasi yang kurang baik akan menghasilkan hal yang membingungkan, seperti kebingungan dalam peran, kurangnya koordinasi antar fungsi, kegagalan untuk berbagi ide, dan lamanya pengambilan keputusan yang membuat manajer menjadi stres dan mengakibatkan konflik. Maka dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi sangat penting dalam sebuah instansi atau perusahaan. Karena dengan adanya struktur organisasi, internal perusahaan dapat lebih terarah dengan baik, komunikasi berjalan dengan baik, memiliki garis komando yang jelas serta dapat menyelesaikan setiap pekerjaannya dengan efektif dan efisien.

Kementerian Pertanian merupakan Instansi Pemerintahan yang cukup luas dan ada berbagai Sub.Bagian dengan berbagai macam struktur organisasi yang terbentuk. Struktur organisasi dibentuk untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang mendukung pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian. Pada masa Kerja Profesi, Praktikan ditempatkan pada Sub.Bagian Kearsipan. Bagian Kearsipan merupakan bagian dari Sekretariat Jenderal Biro Umum dan Pengadaan di bagian Kearsipan dan

Tata Usaha. Berikut adalah struktur organisasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal:



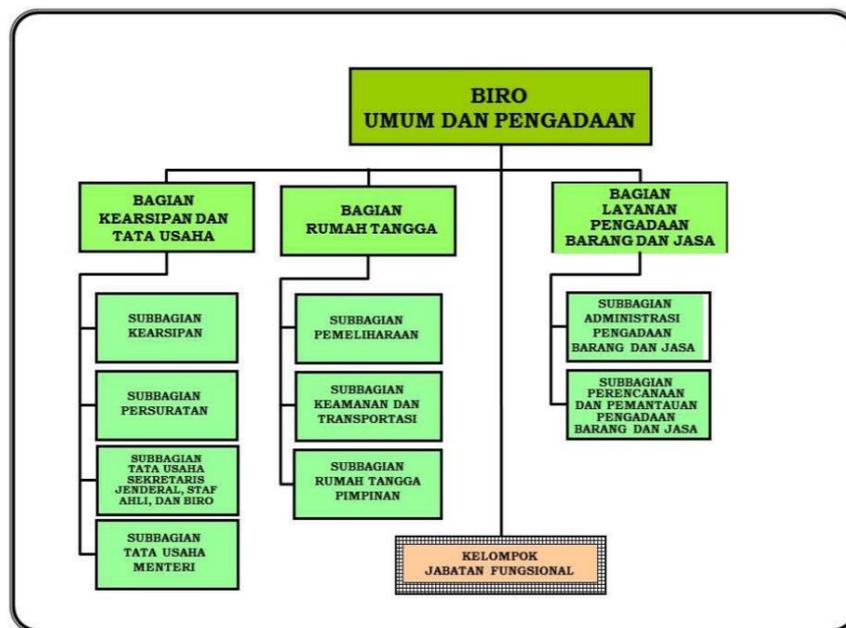
Gambar II. 9 Struktur Organisasi Kementan  
 Sumber: [www.pertanian.go.id](http://www.pertanian.go.id)



Gambar II. 10 Struktur Organisasi Sekretaris Jenderal  
 Sumber: [www.pertanian.go.id](http://www.pertanian.go.id)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Pementan/OT.010/8/2015, disebutkan bahwa Biro Umum dan Pengadaan merupakan salah satu bagian dari Sekretariat Jenderal yang memiliki tugas pokok dan fungsi manajemen untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian, khususnya pada aspek manajemen penyelenggaraan kearsipan, ketatausahaan,

kerumahtanggaan, dan layanan pengadaan barang dan jasa. Maka dari itu untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut, Biro Umum dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyelenggaraan kearsipan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, serta layanan pengadaan barang dan jasa. Berikut merupakan struktur dari Sekretariat Jenderal Biro Umum dan Pengadaan:



**Gambar II. 11 Struktur Organisasi Biro Umum dan Pengadaan**

Sumber: [www.pertanian.go.id](http://www.pertanian.go.id)

Struktur organisasi Biro Umum dan Pengadaan terdiri atas 3 (tiga) bagian dan 2 (dua) kelompok jabatan fungsional, masing masing mempunyai tugas, yaitu:

**a. Bagian Kearsipan dan Tata Usaha**

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan arsip dan dokumentasi, melakukan urusan penerimaan surat masuk dan keluar serta melakukan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli, dan melakukan urusan pelayanan tata usaha Menteri.

**b. Bagian Rumah Tangga**

Mempunyai tugas untuk melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Pusat Rumah Dinas dan Wisma serta melakukan

urusan keamanan dan ketertiban Kantor Pusat, dan melakukan pengelolaan transportasi Sekretariat Jenderal.

**c. Bagian Layanan Barang dan Jasa**

Mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemberian pelayanan administrasi pengadaan barang dan jasa, melakukan penyiapan pembinaan, perencanaan, serta pemantauan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

**d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**

Mempunyai tugas untuk membangun kerja sama yang baik dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk memfasilitasi kinerja Arsiparis dengan lingkup Kementerian Pertanian dan mengatur kinerja dari unit Pengadaan Barang dan Jasa.

Dan dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Umum dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan pengelolaan kearsipan
2. Melaksanakan urusan ketatausahaan
3. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan
4. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa
5. Memberi layanan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa
6. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan Pengadaan.

**2.3 Kegiatan Umum Perusahaan/Bagian/Divisi**

Kementerian Pertanian Republik Indonesia mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah khususnya pada bidang pertanian. Di dalam Kementerian Pertanian Republik Indonesia terdiri dari banyaknya Sub dan Sub.Bagiannya. Praktikan ditempatkan pada Sub.Bagian Kearsipan yang merupakan bagian dari Sekretariat Jenderal Biro Umum dan Pengadaan bagian Kearsipan dan Tata Usaha. Berikut adalah kegiatan umum bagian Praktikan melaksanakan Kerja Profesi:

**Kegiatan umum bagian kearsipan dan ketatausahaan yaitu:**

- a. Melakukan pengelolaan arsip dan dokumentasi kearsipan Kementerian Pertanian.
- b. Melakukan urusan penerimaan surat masuk dan surat keluar.
- c. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umm dan Pengadaan serta Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli.
- d. Melakukan urusan pelayanan tata usaha Menteri.

Kemudian Bagian Kearsipan dan Tata Usaha yang mempunyai masing-masing tugas terdiri dari:

**1. Subbagian Kearsipan**

Melaksanakan 5 (lima) kegiatan, yaitu: (a) Penyusunan Pedoman Kearsipan; (b) Penataan, Penyusutan, dan Pemeliharaan arsip; (c) Lomba Tertib arsip; (d) Seleksi Arsiparis Teladan; (e) Pelaksanaan Elektronisasi Kearsipan.

**2. Subbagian Persuratan**

Melaksanakan 3 (tiga) kegiatan, yaitu: (a) Pengelolaan Persuratan; (b) Pengadaan Bahan dan Dokumen Pimpinan, dan (c) Pengelolaan Bahan Bimbingan Ketatausahaan.

**3. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal, Staf Ahli dan Biro**

Melaksanakan 5 (lima) kegiatan, yaitu: (a) Pengelolaan Ketatausahaan Sekretaris Jenderal; (b) Ketatausahaan Staf Ahli; (c) Pengelolaan Ketatausahaan Biro; (d) Pengelolaan Barang Persediaan; (e) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; (f) Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring.